

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2021

RENCANA KERJA TAHUN 2021



DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN





**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 125 /Kpts/KOMINFO-PS/2020**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 58 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

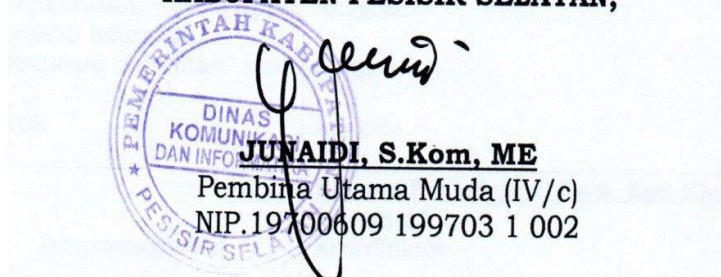
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

- KESATU** : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA** : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan periode 1(satu) tahun yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Mei 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 900 /125/Kpts/KOMINFO-PS/2020
 Tanggal : Mei 2020
 Tentang : Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

NO	SUSUNAN KEANGGOTAAN	JABATAN
1	Pengarah	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
2	Anggota	: 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan 2. Kepala Bidang E Government; 3. Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi; 4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian; 5. Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; 6. Kepala Seksi Persandian; 7. Kepala Seksi Layanan Penyelenggaraan E-Government; 8. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur; 9. Kepala Seksi Pengelolaan, Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik; 10. Kepala Seksi Desiminasi Informasi dan Pemberdayaan Telematika; 11. Kepala Seksi Statistik; 12. Staf

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



[Handwritten signature]

JUNAIDI, S.Kom, ME
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19700609 199703 1 002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat - Nya, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 telah selesai disusun.

Renja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan selama satu tahun. Dengan harapan agar program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika lebih terarah dan terukur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam peningkatan akses Komunikasi dan Informatika bagi masyarakat melalui penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan,

Mei 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESIR SELATAN,**



JUNAIDI, S.Kom, ME
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19700609 199703 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021, menetapkan Visi yang merupakan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera “.

Sedangkan misinya adalah :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan misi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 – 2021 yang tujuannya adalah meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Sasarannya adalah meningkatnya aksesibilitas bagi warga terhadap informasi Pembangunan.

Strategi untuk mewujudkan yaitu peningkatan aksesibilitas bagi warga terhadap informasi Pembangunan, antara lain : peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan sesuai dengan kompetensinya; peningkatan cakupan wilayah untuk pelayanan informasi Pembangunan; peningkatan layanan interaksi pengaduan secara On-Line.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pembantuan bidang komunikasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 1 November 2016. Dalam usianya yang masih muda Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya berbenah diri untuk meningkatkan kinerja baik dalam melaksanakan program / kegiatan maupun bidang administrasi dan keuangan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (Good Governance).

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- b. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- d. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- l. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- m. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

- n. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 ini adalah untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1(satu) tahun ke depan, yang berisikan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dengan dukungan pembiayaan bersumber dari Kabupaten Pesisir Selatan, dengan harapan agar dapat mengakselerasi secara optimal segala partisipasi aktif masyarakat pada berbagai aktivitas produktif pada bidang komunikasi dan informatika.

1.3.2 Tujuan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 ini disusun dengan tujuan :

1. Menjadikannya sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam berbagai forum yang sesuai dengan konstitusi;
2. Merumuskan gambaran umum langkah operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan melalui program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika;
3. Menjadikannya sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran (TA) 2021;
4. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; dan
5. Mewujudkan konsistensi atas sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Renstra dan hasil Musrenbang RKPD dalam mengaplikasikan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Kata Pengantar

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

Pengukuran kinerja dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output) dan hasil(outcome).

Pengukuran Kinerja Kegiatan didasarkan pada target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran. Adapun target kinerja pada masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 754.714.288,-
- Keluaran
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang menunjang rutinitas dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
- Hasil
Terjalaninya pelayanan Perangkat Daerah Pemerintah sehingga semua operasional kantor berjalan dengan baik.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 142.980.000,-
- Keluaran
Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang rutinitas dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

- Hasil

Terjalaninya pelayanan sarana dan prasarana Perangkat Daerah Pemerintah sehingga semua operasional kantor berjalan dengan baik.

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

a. Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama smart city

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 4.009.178.000,-

- Keluaran

Terlaksananya pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika serta data server Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Hasil

Terkoneksinya semua Perangkat Daerah Pemerintah dan Puskesmas dengan akses data dan informasi, dan terpusatnya aplikasi, data dan informasi, untuk penunjang pelayanan dan penyelenggaraan e-government.

4. Program Pengamanan Informasi

a. Pengamanan Informasi dan Sistem Elektronik.

- Masukan

Jumlah Dana yang dibutuhkan : Rp. 72.645.000,-

- Keluaran

Terlaksananya pengamanan informasi dan tersedianya system aplikasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Pesisir Selatan.

- Hasil

Tersedianya pengamanan terhadap 45 Perangkat daerah dan 182 Nagari.

5. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

a. Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluh bagi masyarakat.

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 41.740.000,00

- Keluaran

Terlaksananya pengembangan dan penyebaran informasi dan komunikasi melalui kelompok informasi masyarakat (KIM) dan penilaian media tradisional.

- Hasil

Terbentuknya dan terbinanya KIM serta penilaian media tradisional

b. Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 189.320.000,00

- Keluaran

Terlaksananya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dan penguatan fungsi PPID Utama dan pembantu pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta pemeringkatan keterbukaan informasi public tingkat Kabupaten dan Provinsi

- Hasil

Terwujudnya layanan informasi public dan SDM yang mampu dalam pelayanan informasi publik

c. Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 325.335.000,00

- Keluaran

Penyampaian informasi pembangunan pemerintah daerah melalui LPPL Radio Langkisau FM dan Mobil Penerangan Keliling.

- Hasil

Tersampainya informasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dari 45 PD ke wilayah Kabupaten Pesisir Selatan melalui LPPL Radio Langkisau FM dan Mobil Penerangan Keliling.

6. Program Kerjasama Informasi dan Media Masa

a. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 171.895,00

- Keluaran
Terlaksananya penyebaran informasi pemerintah melalui website pemerintah daerah dan publikasi serta promosi daerah melalui media elektronik/online
- Hasil
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pembangunan daerah.

7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

a. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan

- Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 37.045.000,00
- Keluaran
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik.
- Hasil
Meningkatnya pengetahuan dan penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

8. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika

a. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

- Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 86.225.000,00
- Keluaran
Terlaksananya Pelatihan/Bimtek Aparatur dan pegawai pemerintahan nagari dalam bidang TIK.
- Hasil
Tersedianya aparatur dan pegawai pemerintah nagari yang mengerti dalam penggunaan TIK .

9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

a. Penyediaan Data Statistik Daerah

- Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 111.210.000,00
- Keluaran
Terlaksananya penyediaan data statistic sectoral dan daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam bentuk buku dan data elektronik
- Hasil
Tersedianya informasi dan data statistic daerah Kabupaten Pesisir Selatan

10. Program Pola Hubungan Jaringan Persandian

a. Pengelolaan Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah

- Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 43.960.000,00
- Keluaran
Terpenuhinya pola hubungan komunikasi Pemerintah Daerah dan SDM pengamanan informasi yang terampil
- Hasil
Meningkatnya Keamanan Infomasi Pemerintah Daerah

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN

RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021 KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi Dan Informatika

1	URUSAN/BID. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2017	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2020		KET
					TARGET RENJA TAHUN 2019	REALISASI RENJA TAHUN 2019	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2020)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)	12
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan pelayanan administrasi kantor									
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan Air, Listrik dan jasa komunikasi	39.952.294	108.153.341	110.000.000	106.900.591	97%	240.900.000	455.953.932	11,41	
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Ketersediaan layanan administrasi keuangan	46.350.000	71.400.000	80.000.000	81.000.000	100%	87.600.000	240.000.000	5,18	
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantor	30.035.500	45.326.000	50.000.000	50.198.162	100%	44.241.945	139.766.107	4,65	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Ketersediaan alat tulis	37.172.700	40.803.000	70.000.000	65.522.714	94%	56.111.807	162.437.521	4,37	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetak dan penggandaan	37.814.400	37.240.000	45.000.000	42.036.000	93%	31.150.000	110.426.000	2,92	

[illegible]

	07	Perencanaan dan Pengembangan kebijakan Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik	-	-	-	-		37.045.000	37.045.000	-	
17		Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi										
	01	Pelatihan SDM bidang Komunikasi Dan Informasi	Terlaksananya pelatihan/Bimtek aparatur dan pegawai pemerintahan nagari dalam bidang TIK	-	44.003.800	120.000.000	105.395.000	88%	86.225.000	235.623.800	-	
18		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa										
	01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya penyebaran informasi pemerintah melalui website pemerintah daerah dan publikasi serta promosi daerah melalui media elektronik/online	-	-	-	-	-	171.895.000	171.895.000	-	
20		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik										
	08	Pelayanan Informasi Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	Terlaksananya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dan penguatan fungsi PPID Utama dan pembantu pememrintah Kab. Pessel serta pemeringkatan keterbukaan informasi	-	-	-	-	-	189.320.000	189.320.000	-	

[illegible]

	01	Pengamanan Informasi dan Sistem Elektronik	Terlaksananya assesment system aplikasi	-	-	-	-	-	61.995.000	61.995.000	-	
15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah										
	05	Penyediaan Data Statistik Daerah	Terlaksananya penyediaan data statistik sektoral dan daerah kab. Pessel dalam bentuk buku dan data elektronik	-	-	-	-	-	111.210.000	111.210.000	-	
16		Program Pola Hubungan Jaringan Persandian										
	01	Pengelolaan Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah	Terpenuhinya pola hubungan komunikasi pemerintah daerah dan SDM pengaman informai yang terampil	-	-	-	-	-	43.960.000	43.960.000	-	

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan pembentukan Perangkat Organisasi Daerah baru terbentuk pada tahun 2016 maka program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika secara umum menjalankan beberapa program yang dilaksanakan pada Tahun 2020.

Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kejasama Smart City di Kabupaten Pesisir Selatan.

- Kegiatan Pengembangan Smart City adalah konsep kota cerdas yang dirancang dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia maupun semua aspek yang menikmati smart city ini, Smart City membantu berbagai hal kegiatan masyarakat terutama dalam upaya mengelola sumber daya yang ada dengan efisien serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat, hingga pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan Komunikasi dan Informasi yang terarah kepada seluruh Perangkat Daerah dan Masyarakat. Namun demikian, lembaga atau organisasi pemerintahan tidak bisa secara gegabah mengeluarkan investasi untuk implementasi Teknologi Informasi, perlu diperhitungkan *cost* dan *benefit* yang dihasilkannya. Organisasi membutuhkan semacam *blue print* yang sering disebut *IT Master Plan* atau *IT Strategic Plan* sebagai dasar organisasi dalam mengimplementasi Teknologi Informasi dan mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui penyusunan:

- Kerangka Pemikiran Dasar (*e-Government Framework*);
- Arsitektur Pengembangan (*e-Government Architecture*);
- Solusi Pentahapan Pengembangan (*e-Government Roadmap*);
- Rencana Proyek Implementasi 4 Tahun (*e-Government Implementation Plan*).

2. Tersedianya Aparatur yang cakap dalam bidang Teknologi Informatika Komunikasi

- Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi.
- Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memuat semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi.

- Penanganan ini meliputi pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Bidang teknologi informasi tergolong bidang baru dibandingkan dengan bidang-bidang pekerjaan lainnya. Hal itu menyebabkan terjadinya kelangkaan sumber daya manusia dan tenaga kerja di bidang ini. Untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah terpadu untuk mempersiapkan sumber daya manusia di bidang tersebut diantaranya melalui pelatihan dan bimbingan teknis aparatur.

- Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah.

Radio Langkisau merupakan radio milik pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berfungsi untuk memberikan informasi pada Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Penyampaian Informasi pembangunan daerah juga dilakukan dengan penggunaan mobil penerangan keliling.

3. Tersedianya pengamanan terhadap aplikasi dan data informasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Kegiatan Pengamanan Informasi dan Sistem Elektronik.

Kegiatan ini merupakan tugas pokok dan fungsi dimana menghimpun bahan dan mensistematisasikan data atau informasi yang berhubungan dengan informasi publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

- a. Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.

KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) atau kelompok sejenis lainnya adalah kelompok yang dibentuk **oleh, dari, untuk** masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

Kelompok masyarakat dimaksud diberi nama generik Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Respon terhadap kehadiran KIM cukup besar, terutama dari aparat Kecamatan yang membutuhkan wahana penyaluran dan pendayagunaan informasi oleh masyarakat.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah suatu lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Situasi yang ada saat ini membuat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan perlu melakukan pembinaan terhadap KIM yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. KIM baru bisa terbina dengan baik sebanyak 15 (lima belas) KIM.

b. Kegiatan Pelayanan Informasi Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Hakekat Pelayanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan masuk dalam kelompok pelayanan jasa, yaitu menyediakan berbagai hal yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya dan pemohon informasi pada khususnya.

5. Program Kerjasama Informasi dan Media Masa

a. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Pesatnya teknologi informasi memungkinkan publik berinteraksi lebih cepat dalam mengabarkan peristiwa dibanding media arus utama. Hal ini kemudian memunculkan istilah *citizen journalism*, dimana informasi dari masyarakat dapat langsung disebarluaskan melalui jagat maya. Konsep ini lebih mengedepankan kecepatan penyebaran informasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan memiliki kepentingan dalam mendukung eksistensi media arus utama. Di satu sisi, media jenis ini lebih mampu menginformasikan dengan baik berbagai program yang dijalankan Pemerintah. Perkembangan media arus utama

akan turut berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menjangkau sampai wilayah kenagarian se Kabupaten Pesisir Selatan.

Website merupakan media sebagai penyebaran informasi melalui internet. Informasi yang akurat dan aktual sangat dibutuhkan oleh Organisasi dan masyarakat. Website dapat membantu sistem pendataan dan pelaksanaan kerja Perangkat Daerah, dari proses manual menjadi proses yang sistematis. Sistem informasi akan dirancang menggunakan sistem terkomputerisasi berbasis web yang dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman dan penyimpanan data dalam database.

Kegiatan pemrosesan data dan informasi adalah untuk pengembangan dan pemberdayaan sistem informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kualitas informasi di Kabupaten Pesisir Selatan, nampaknya informasi dan komunikasi daerah dapat menjawab tantangan yang berkembang dengan melakukan pemrosesan data informasi dengan melalui berbagai sarana dan prasarana yang dimanfaatkan secara optimal agar data tersebut menjadi akurat dan dapat dipertanggung jawabkan untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. Selain itu diharapkan juga dapat menciptakan kemudahan-kemudahan dalam pemanfaatan untuk mensukseskan data dan informasi tersebut.

6. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

a. Kegiatan Penyediaan Data Statistik Daerah.

Penyusunan Data Statistik Daerah merupakan data sektoral menjadi tugas Organisasi Perangkat Daerah terkait. Serta statistik khusus yang disiapkan lembaga penelitian serta perguruan tinggi.

Oleh karena itu diperlukan kolaborasi dari seluruh lembaga penyajian data lainnya agar data bisa menjadi masukan bagi kepala daerah untuk menjadi evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

7. Program Pola Hubungan Jaringan Persandian

a. Pola hubungan komunikasi Pemerintah Daerah dan SDM pengamanan informasi yang terampil harus

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan evaluasi capaian kinerja keuangan tahun 2020 memperoleh dana sebesar Rp. 5.978.177.288,-

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan

No	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indeks Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik		Jumlah indikator SPBE yang harus terpenuhi	-	3,12	3,25	3,30	3,43	3,45	3,30	3,50	
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik		Daftar informasi publik yang dipublish	-	75%	81%	85%	84%	85%	85%	90%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Belum terciptanya koordinasi yang handal antara lintas sektoral dalam melaksanakan program / kegiatan.
2. Kurangnya SDM dari masyarakat tentang Teknologi Informatika
3. Kurangnya Aparatur yang memiliki kemampuan tentang Komunikasi dan teknologi informasi.
4. Lemahnya koordinasi lembaga-lembaga di masyarakat dalam pembinaan kelompok Informasi Masyarakat .
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mengakses informasi pembangunan daerah
6. Kurang mampunya masyarakat dalam pemanfaatan akses komunikasi dan informatika.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Tujuan review dokumen RKPD oleh Provinsi/kabupaten/kota adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKPD sesuai dengan RPJMD.

Review tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit karena revidi tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas dokumen sumber dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Pemenuhan pelayanan administrasi kantor		754.712.288,-	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Pemenuhan pelayanan administrasi kantor			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. IV Jurai	Ketersediaan Air, Listrik dan jasa komunikasi	12 Bulan	240.900.000,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. IV Jurai	Ketersediaan Air, Listrik dan jasa komunikasi	100%	135.000.000,-	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. IV Jurai	Ketersediaan layanan administrasi keuangan	12 Bulan	87.600.000,-	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. IV Jurai	Ketersediaan layanan administrasi keuangan	100%	125.000.000,-	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. IV Jurai	Ketersediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	44.241.945,-	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. IV Jurai	Ketersediaan jasa kebersihan kantor	100%	175.000.000,-	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. IV Jurai	Ketersediaan alat tulis	12 Bulan	56.111.807,-	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. IV Jurai	Ketersediaan alat tulis	100%	50.000.000,-	
	Penyediaan Barang Cetak dan	Kec. IV	Ketersediaan barang cetak	12 Bulan	31.150.000,-	Penyediaan	Kec. IV	Ketersediaan barang	100%	20.000.000,-	

	Penggandaan	Jurai	dan penggandaan			Barang Cetakan dan Penggandaan	Jurai	cetak dan penggandaan			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. IV Jurai	Ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	12 Bulan	20.665.000,-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. IV Jurai	Ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	100%	20.000.000,-	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kec. IV Jurai	Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 Bulan	9.180.000,-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kec. IV Jurai	Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	100%	50.000.000,-	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. IV Jurai	Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu	12 Bulan	31.487.500,-	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. IV Jurai	Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu	100%	40.000.000,-	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kec. IV Jurai	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	186.026.036,-	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kec. IV Jurai	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	290.000.000,-	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kab. Pessel	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan	29.550.000,-	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kab. Pessel	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100%	70.000.000,-	
	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Kab. Pessel	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	12 Bulan	17.800.000,-	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Kab. Pessel	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	100%	46.000.000,-	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Ketersediaan sarana prasarana penunjang		180.910.000,-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Ketersediaan sarana prasarana penunjang			

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kec. IV Jurai	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	163.160.000,-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kec. IV Jurai	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	100%	175.000.000,-	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. IV Jurai	jumlah Perlengkapan gedung kantor di beli	12 Bulan	17.750.000,-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kec. IV Jurai	Terpeliharanya peralatan Kantor	100%	35.000.000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. IV Jurai	jumlah peralatan gedung kantor di beli	12 Bulan	0	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. IV Jurai	jumlah peralatan gedung kantor di beli	100%	150.000.000,-	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku		37.045.000	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku			
	Perencanaan dan Pengembangan kebijakan Komunikasi dan Informasi	Kab. Pessel	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik	120 ASN	37.045.000,-	Perencanaan dan Pengembangan kebijakan Komunikasi dan Informasi	Kab. Pessel	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik	100%	70.000.000,-	
	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi		Tercapainya peningkatan SDM ASN dan masyarakat dalam pemanfaatan TIK guna peningkatan kemampuan bekerja dan meningkatkan kesejahteraan		86.225.000,-	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi		Tercapainya peningkatan SDM ASN dan masyarakat dalam pemanfaatan TIK guna peningkatan kemampuan bekerja dan meningkatkan kesejahteraan			

	Pelatihan SDM bidang Komunikasi Dan Informasi	Kab. Pessel	Terlaksananya pelatihan/Bimtek aparatur dan pegawai pemerintahan nagari dalam bidang TIK	45 OPD & 182 Nagari	86.225.000,-	Pelatihan SDM bidang Komunikasi Dan Informasi	Kab. Pessel	Terlaksananya pelatihan/Bimtek aparatur dan pegawai pemerintahan nagari dalam bidang TIK	100%	100.000.000,-	
	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa		Tercapainya penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik pemerintah kab. Pessel		171.895.000,-	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa		Tercapainya penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik pemerintah kab. Pessel			
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	-	Terlaksananya penyebaran informasi pemerintah melalui website pemerintah daerah dan publikasi serta promosi daerah melalui media elektronik/online	300 berita website, 120 artikel website dan 15 media elektronik	171.895.000,-	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	-	Terlaksananya penyebaran informasi pemerintah melalui website pemerintah daerah dan publikasi serta promosi daerah melalui media elektronik/online	100%	190.000.000,-	
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Tersedianya informasi publik pemerintah Kab. Pessel		556.395.000,-	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Tersedianya informasi publik pemerintah Kab. Pessel			

	Pelayanan Informasi Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	Kab. Pessel	Terlaksananya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dan penguatan fungsi PPID Utama dan pembantu pememrintah Kab. Pessel serta pemeringkatan keterbukaan informasi publik tingkat kabupaten dan provinsi	45 OPD, 182 Nagari, 15 Sekolah, BUMD dan pemeringkatan keterbukaan informasi publik tingkat kab dan prov	189.320.000,-	Pelayanan Informasi Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	Kab. Pessel	Terlaksananya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dan penguatan fungsi PPID Utama dan pembantu pememrintah Kab. Pessel serta pemeringkatan keterbukaan informasi publik tingkat kabupaten dan provinsi	100%	200.000.000,-	
	Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah	Kab. Pessel	Terlaksananya informasi pembangunan pemerintah daerah melalui LPPL Radio Langkisau FM, TV Langkisau dan Mobil Unit penerangan informasi	12 Bulan	325.335,000,-	Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah	Kab. Pessel	Terlaksananya informasi pembangunan pemerintah daerah melalui LPPL Radio Langkisau FM, TV Langkisau dan Mobil Unit penerangan informasi	100%	400.000.000,-	
	Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Kab. Pessel	Terpenuhinya pembinaan kelompok informasi masyarakat dan pemeringkatan media tradisional tingkat provinsi	15 Kec. dan pemeringkatan metra tingkat provinsi	41.740.000,-	Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Kab. Pessel	Terpenuhinya pembinaan kelompok informasi masyarakat dan pemeringkatan media tradisional tingkat provinsi	100%	60.000.000,-	
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Tercapainya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah Kab. Pessel		3.973.838.000	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Tercapainya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah Kab. Pessel			

	Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smartcity	Kab. Pessel	Terlaksananya penyediaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, integrasi jaringan dan internet/intranet lingkup pemerintah Kab. Pessel, videotron, dan pemeliharaan jaringan, data dan infrastruktur TIK, serta pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi lingkup kab. Pessel	1. Integrasi jaringan komunikasi data 2. 4 Minitower 3. 1 unit videotron 4. Drone 5. DED Command Centre 6. Pemeliharaan jaringan dan infrastruktur TIK selama 12 Bulan 7. Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi 8. PAD retribusi	3.973.838.000	Penyelenggaraa n Ekosistem TIK dan Kerjasama Smartcity	Kab. Pessel	Terlaksananya penyediaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, integrasi jaringan dan internet/intranet lingkup pemerintah Kab. Pessel, videotron, dan pemeliharaan jaringan, data dan infrastruktur TIK, serta pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi lingkup kab. Pessel	100%	4.500.000.000,-	
	Program Pengamanan Informasi		Terlaksananya keamanan informasi pemerintah daerah		61.995.000,-	Program Pengamanan Informasi		Terlaksananya keamanan informasi pemerintah daerah			
	Pengamanan Informasi dan Sistem Elektronik	Kab. Pessel	Terlaksananya assesment system aplikasi	45 OPD, 182 pemerintah Nagari dan 4 system aplikasi	61.995.000,-	Pengamanan Informasi dan Sistem Elektronik	Kab. Pessel	Terlaksananya assesment system aplikasi	100%	70.000.000,-	
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		Terlaksananya ketersediaan informasi dan statistik daerah		111.210.000,-	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah		Terlaksananya ketersediaan informasi dan statistik daerah			
	Penyediaan Data Statistik Daerah	Kab. Pessel	Terlaksananya penyediaan data statistik sektoral dan daerah kab. Pessel dalam bentuk buku dan data elektronik	230 buku PSDA, 15 buku statistik sektoral, 180 buku kecamatan dalam angka, 30 Buku PDRB, dan 5 buku laporan tahunan	111.210.000,-	Penyediaan Data Statistik Daerah	Kab. Pessel	Terlaksananya penyediaan data statistik sektoral dan daerah kab. Pessel dalam bentuk buku dan data elektronik	100%	135.000.000,-	

	Program Pola Hubungan Jaringan Persandian		Terlaksananya keamanan informasi daerah		43.960.000,-	Program Pola Hubungan Jaringan Persandian		Terlaksananya keamanan informasi daerah			
	Pengelolaan Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah	Kab. Pessel	Terpenuhinya pola hubungan komunikasi pemerintah daerah dan SDM pengaman informai yang terampil	10 Buku dan 45 orang	43.960.000,-	Pengelolaan Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah	Kab. Pessel	Terpenuhinya pola hubungan komunikasi pemerintah daerah dan SDM pengaman informasi yang terampil	100%	50.000.000,-	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan bagi kepentingan masyarakat masih sangat terbatas mengingat anggaran yang tersedia sangat minim padahal untuk menangani masalah komunikasi dan infomatika merupakan tanggungjawab lintas sektor. Koordinasi lintas sektor lebih ditingkatkan agar program dan kegiatan dapat bersinergis sehingga mencapai sasaran yang terarah dan tepat.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah :Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dalam Era Otonomi Daerah agar dapat didayagunakan secara optimal melalui Bidang Komunikasi dan Informatika.

Guna mencapai tujuan dan maksud tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Lembaga Pemerintah Daerah yang berperan membantu dalam menangani bidang Komunikasi dan Informatika dengan melaksanakan Misi Kepala Daerah yaitu ***“Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Aparatur yang bersih, responsive dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat”***. Makna yang terkandung dalam Misi diatas adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya e government menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Dinas Komunikasi dan Informatika mewujudkan misi Bupati sebagai berikut :

- a. Mewujudnya smart city bagi masyarakat Pesisir Selatan.
- b. Mengupayakan kelancaran pelaksanaan komunikasi dan informatika.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam bentuk kelompok informasi masyarakat dengan pemerintah daerah.
- d. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengembangan komunikasi dan informatika, serta pemantauan dan evaluasi.
- e. Mengoptimalkan pembinaan kemandirian kelompok informasi di lapangan.
- f. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menginformasikan pembangunan daerah.
- g. Meningkatkan kemampuan aparat, pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengakses komunikasi dan informatika.
- h. Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat nagari.
- i. Meningkatkan mutu data statistik lintas sektoral dalam menyajikan informasi pemerintah daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 ini disusun dengan tujuan :

1. Memberikan gambaran arah dan tujuan perencanaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan.
2. Untuk memudahkan para pelaksana dalam melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi perencanaan kegiatan-kegiatan.
3. Sebagai bahan untuk musrenbang tingkat Kabupaten.

2. Sasaran

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 ini disusun dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kepada semua kelompok masyarakat.
2. Terwujudnya aparatur yang menangani bidang Komunikasi dan Informatika secara professional.
3. Meningkatnya peran Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Meningkatnya koordinasi, konsultasi dan sinergisitas program dan kegiatan antara Dinas/ Badan yang terkait dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Meningkatkan akses jaringan data informasi yang digunakan oleh perangkat daerah dan masyarakat.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun program dan kegiatan yang dirancang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan untuk dioperasionalisasikan pada tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran.

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 21	URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran <u>Kegiatan</u> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pembayaran rekening - listrik - Air -Telfon	DISKOMIN FO	100%	135.000,00	APBD		100%	168.750,00	1

[illegible]

	Kebersihan Kantor	pembayaran jasa kebersihan kantor - Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan	FO						
	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya makan minum rapat - Tersedianya makan minum tamu - Tersedianya makan minum harian	DISKOMIN FO	100%	40.000,00	APBD		100%	50.000,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksana koordinasi dan konsultasi keluar daerah	DISKOMIN FO	100%	290.000,00	APBD		100%	362.500,00
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	DISKOMIN FO	100%	70.000,00	APBD		100%	81.000,00
	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan	DISKOMIN FO	100%	46.000,00	APBD		100%	53.000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

				Persandian Kegiatan Pengelolaan Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah	Terlaksananya keamanan informasi daerah - Pembinaan 45 admin PD -10 Buku	Kab.Pessel	100%	50.000,00	APBD		100%	70.000,00	
J U M L A H								9.546.000,00				7.657.750,00	

PAINAN,

JUNI 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**


JUNAIDI, S.Kom, ME
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19700609 199703 1 002

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 21	URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran								

Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<u>Sub Kegiatan</u>							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran rekening - listrik - Air -Telfon -dll	DISKOMIN FO	100%	135.000,00	APBD	100%	168.750,00
	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Pelaporan	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan - 15 Laporan	DISKOMIN FO	100%	26.000,00	APBD	100%	33.000,00
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasil - 15 laporan	DISKOMIN FO	100%	20.000,00	APBD	100%	30.000,00
Kegiatan Administarsi Keuangan								

Sub Kegiatan									
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelola Keuangan	DISKOMIN FO	100%	125.000,00	APBD		100%	156.250,00	
Pengadaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DISKOMIN FO	100%	175.000,00	APBD		100%	218.750,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Tersedianya barang cetakan - Tersedianya Penggandaan Dokumen	DISKOMIN FO	100%	50.000,00	APBD		100%	100.000,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	DISKOMIN FO	100%	20.000,00	APBD		100%	25.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DISKOMIN FO	100%	20.000,00	APBD		100%	25.000,00	

				Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor	-Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor -Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan	DISKOMIN FO	100%	50.000,00	APBD		100%	62.500,00	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya makan minum rapat - Tersedianya makan minum tamu - Tersedianya makan minum harian	DISKOMIN FO	100%	40.000,00	APBD		100%	50.000,00	
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksana koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	DISKOMIN FO	100%	360.000,00	APBD		100%	450.000,00	
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan : - laptop - meja,kursi,lemari,filling cabinet	DISKOMIN FO	100%	150.000,00	APBD		100%	170.000,00	

	Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	- dll Terlaksananya pemeliharaan -Mobil -Sepeda Motor - dll	DISKOMINFO	100%	170.000,00	APBD		100%	175.000,00
	Pemeliharaan Rutin / berkala perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor -Laptop -Printer dll	DISKOMINFO	100%	30.000,00	APBD		100%	35.000,00
	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika Kegiatan								
	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Tersediannya tenaga ahli bid,komunikasi - 120 orang SDM TIK (4 pelatihan x 30	Kab. Pessel	100%	100.000,00	APBD		100%	180.000,00

[illegible]

[illegible]

				pemerintah daerah melalui mobil keliling								
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Pembinaan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat - 15 KIM (Media Tradisional) - Pemingkatan Media tradisional tingkat Kabupaten dan Provinsi	Kab.Pessel	100%	60.000,00	APBD		100%	65.000,00
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan								
				Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas	1). Terintegrasinya jaringan Komunikasi data 45 Perangkat Daerah, 20 Puskesmas, dan 100 nagari 2). 4 Paket Mini tower TIK 3). 3 Videotron	Kab. Pessel	100%	6.900.000,00	APBD		100%	4.500.000,00

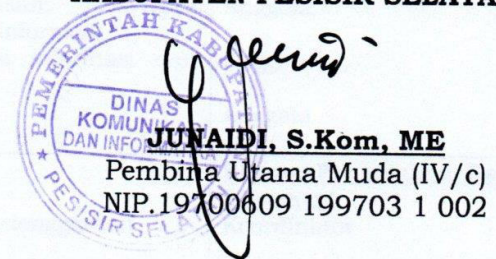
**Program
Penyelenggaraan
Persandian Untuk
Pengamanan
Informasi
Kegiatan
Penyelenggaraan
Persandian untuk
pengamanan**

4). 1 paket media
center/video
conference
command center ,
1 paket CCTV pasar
painan, 3 paket
CCTV area
publik/wisata,PC,ser
ver
5). Pemeliharaan
jaringan dan
infrastuktur TIK
12 bulan
6). Pengawasan dan
Pengendalian
Menara
Telekomunikasi
7). PAD retribusi
menara
telekomunikasi

				Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
				Sub Kegiatan								
				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Dan Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	"Terlaksananya pengamanan informasi publik terhadap 45 Perangkat Daerah,182 Nagari dan 5 aplikasi	Kab.Pessel	100%	70.000,00	APBD		100%	80.000,00
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintag Daerah Kabupaten/Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya keamanan informasi daerah - Pembinaan 45 admin PD -10 Buku	Kab.Pessel	100%	50.000,00	APBD		100%	70.000,00
J U M L A H								9.546.000,00			7.657.750,00	

PAINAN,

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



JUNAIDI, S.Kom, ME
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19700609 199703 1 002

JUNI 2020

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENJA Dinas Komunikasi Dan Informatika 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan RENSTRA Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2016-2021. RENJA Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2021 juga merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, sehingga Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2021 dengan efektif dan efisien.
2. RENJA Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2021, dimana RENJA Tahun 2021 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA Tahun 2021.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.
5. Renja Tahun 2021 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika , guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2021 yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2021.

Penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan didasarkan atas berbagai pertimbangan dan perubahan lingkungan strategis dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah maupun kebijakan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informatika.

Semoga Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Painan, Mei 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESIR SELATAN,**



JUNAIDI, S.Kom, ME

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19700609 199703 1 002